

Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Mandupang

Rusman¹, Sri Nurabdiah Pratiwi², Muhammad Isman³

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan Tinggi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Jalan Denai No 217 Medan Denai, Indonesia

Email : rusman@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas manajemen pembiayaan pendidikan sekolah unit pelaksana teknis daerah satuan pendidikan formal sekolah dasar Negeri Mandumpang.. Penelitian menggunakan pendekatan mix metode, Penelitian ini dilaksanakan UPTD Sekolah dasar Negeri Mandumpang, Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Teknik analisis data dengan penyajian data, display data dan penarik kesimpulan. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Perencanaan Pembiayaan Pendidikan Di Uptd Spf Sekolah Dasar Negeri Mandumpang meliputi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perhitungan Alokasi Biaya Pengembangan Pendidik, dan Penerapan Alokasi Biaya Pengembangan Pendidik .Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Di Uptd Spf Sekolah Dasar Negeri Mandumpang dengan cara mengontrol anggaran di sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai manajer sekolah. serta menyusun laporan hasil pelaksanaan program kepada pihak terkait.Efektivitas manajemen pembiayaan pendidikan di UPTD SPF Sekolah Dasar Negeri Mandumpang dengan Prinsip keterbukaan dalam mengelola pembiayaan di UPTD SPF Sekolah Dasar Negeri Mandumpang, sangat ditekankan oleh kepala sekolah dan seluruh yang terlibat. Nilai fektifitas pembiayaan pendidikan, proses penganalisaannya dilakukan dengan melihat keterhubungan hasil yang diperoleh antara input dan ouput dari keseluruhan proses pendidikan. Tingkat kecendrungan adanya efektivitas manajemen pembiayaan sekolah dengan nilai mean 78,11% dan median 79.00% sehingga dengan manajemen pembiayaan sekolah adanya di UPTD SPF Sekolah Dasar Negeri Mandumpang memiliki dampak

Kata Kunci: *Efektivitas, Manajemen, Pembiayaan Pendidikan*

ABSTRACT

The aim of the research is to determine the effectiveness of education financing management in improving the quality of education. The type of research approach is a mixed method approach. This research was carried out by the Mandumpang state elementary school UPTD. Using observation, interview, documentation and questionnaire data collection techniques. Data analysis techniques by presenting data, displaying data and drawing conclusions. The respondents for this research were school principals, deputy principals, teachers, treasurers and committee members as well as students. The research results show that Educational Financing Planning at UPD SPF Mandumpang State Elementary School includes the Development of Educators and Education Personnel, Calculation of Educator Development Cost Allocations, and Implementation of Educator Development Cost Allocations. Implementation of Education Financing at Mandumpang State Elementary School Uptd Spf by controlling the budget in the school must be controlled by the school principal as school manager. as well as preparing reports on the results of program

implementation to related parties. The effectiveness of education financing management at the UPTD SPF SDN Mandumpang State Elementary School with the principle of openness in managing financing at the UPTD SPF SDN Mandumpang State Elementary School, is highly emphasized by the school principal and all those involved. The trend level for school financing management effectiveness is with a mean value of 78.11% and a median of 79.00% so that school financing management in the UPTD SPF SDN Mandumpang State Elementary School has an impact.

Keywords: *Effectiveness, Management, Education Financing*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yaitu membasmi kebodohan. Namun dalam kenyataannya, pendidikan di Negara Indonesia masih mempunyai beberapa masalah atau persoalan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan unsur yang multak harus tersedia. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (Instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggran pendidikan. Suatu lembaga akan dapat berfungsi dengan memadai kalau memiliki sistem manajemen pembiayaan yang bagus.

Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kondisi empirik menunjukkan bahwa penerimaan dana pendidikan sesungguhnya belum dapat memenuhi tuntutan operasional secara ideal. Hal itu disebabkan oleh berbagai hal yang mempengaruhi penyediaan dana pendidikan seperti terbatasnya dana pemerintah, kebijakan pajak pendidikan belum ditetapkan, kemampuan masyarakat khususnya orang tua masih bervariasi pendapatannya dibandingkan pengeluaran yang harus ditanggulangnya, demikian pula pihak swasta masih belum banyak yang peduli terhadap sumbangan finansial penyelenggaraan perencanaan pendidikan.

Memperhatikan hal tersebut, dalam pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan yang paling kompleks tidak terlepas dari prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Melalui perencanaan dibidang pendidikan, lembaga pendidikan mampu menyiapkan *output* (Azhari, 2016). Perencanaan pendidikan akan lebih baik dengan adanya pembiayaan Pendidikan yang bernilai strategis itu tidak akan berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses pendidikan. Pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber biaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan alokasi belanja untuk proses pengajaran, termasuk pengeluaran sekolah untuk gaji dan berbagai pelayanan di setiap jenis lembaga pendidikan. Dengan kata lain, pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber dan alokasi dana untuk penyelenggaraan pendidikan. Menurut Akdon (2010) bahwa biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain besar kecilnya sebuah institusi, jumlah siswa, tingkat gaji guru atau dosen yang

disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, rasio siswa sebanding guru dan dosen, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk (khususnya Negara berkembang), perubahan kebijakan dari penggajian atau pendapatan (*revenue theory of cost*).

Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, system dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tatanan, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini (Fadillah, 2015).

Pengelolaan keuangan dalam manajemen pembiayaan adalah salah satu hal yang utama pada sebuah lembaga pendidikan. Didukung oleh Minarti (2018) mengelola keuangan memang menjadi hal penting dalam sebuah lembaga, jika dalam pengelolaan dana terdapat kegagalan maka hal itu dapat mempengaruhi kegiatan operasional pada lembaga pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian manajemen pembiayaan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mencapai tujuan sebuah lembaga pendidikan tersebut. Manajemen pembiayaan tidak bisa berperan dengan sendirinya tanpa adanya peran dan fungsi dari komponen standar rasional pendidikan yang lainnya dan ini akan menjadi efektif apabila semua komponen ikut terlibat untuk melakukan senergi yaitu dengan adanya dukungan masing-masing komponen, maka tujuan dari sebuah lembaga pendidikan itu akan tercapai (Minarti, 2011).

Pengelolaan Pembiayaan di MTs Al-Ikhlas Campaka dilaksanakan dengan proses perencanaan anggaran. Penganggaran pembiayaan telah dilaksanakan secara baik dan transparan. Sumber Pembiayaan diperoleh dari beberapa sumber yaitu :sumber dana dari masyarakat (SPP), sumber dana dari pemerintah berupa dana BOS. Pelaksanaan pembiayaan berdasarkan anggaran yang sudah dibuat (RKAS), pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan dilakukan kepala sekolah dan yayasan. Pengelolaan pembiayaan sudah dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Pada saat perencanaan sudah melibatkan pihak pihak yang mewakili bagian- bagian yang ada di sekolah. Pengelolaan pembiayaan juga masih ada kekurangannya yaitu belum semua pos dituangkan dalam RKAS, karena masih ada pengeluaran di luar RKAS untuk proses kelancaran KBM Faktor pendukung dan Penghambat. Faktor pendukung dalam pengelolaan pembiayaan: sekolah berhak mengatur pembiayaan sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah tanpa tergantung seutuhnya pada pihak yayasan. Faktor penghambat dalam pengelolaan pembiayaan :tidak lancar sumber dana pembiayaan baik turunnya dana BOS maupun keterlambatan siswa dalam pembayaran SPP.

Manajemen pembiayaan memiliki fungsi dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan. Dimana terdapat 3 tahapan dalam mengatur keuangan lembaga pendidikan diantaranya perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, serta pengawasan dan pengevaluasian pembiayaan. Tahap pertama yaitu perencanaan tahapan dimana memberikan sebuah gambaran atau perencanaan untuk kedepannya agar kita dapat mengetahui pada setiap satuan biayanya. Selanjutnya ditahap pelaksanaan pembiayaan yaitu berkaitan dengan pengalokasian dana yang sudah direncanakan. Pada tahap ini juga berkaitan dengan pencatatan terhadap setiap sarana dan prasarana yang telah

diadakan oleh pihak sekolah. Tahap terakhir yaitu tahap pengevaluasian dan monitoring pembiayaan yaitu sebuah tahapan pertanggungjawaban atau penilaian terhadap apa yang telah direncanakan dan yang telah dilaksanakan.

Mempersiapkan pelaksanaan RKAS diharapkan mampu menunjang pencapaian tujuan pendidikan melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Sering terjadi penundaan karena ketidaksiapan guru untuk mempertanggungjawabkan alokasi dana kelas yang di berikan setiap 6 bulan per semester. Selain itu dalam menjalankan pelaksanaan pembiayaan pendidikan tidak sesuai dengan aplikasi dana yang disampaikan pemerintah melalui dinas kabupaten masing-masing daerah. Seperti halnya terdapat pengalihan beberapa kegiatan yang tidak termasuk pada pembiayaan layaknya penggantian nama kegiatan dengan biaya yang sedikit dilebihkan.

Peneliti melakukan observasi di temukan siswa dengan membawa sapu baru untuk di gunakan didalam kelas dengan pengalihan nilai keterampilan. Hal ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum yang mungkin akna selalu terjadi jika tidak di tindak lanjuti. Oleh karena itu, berdasarkan rekap anggaran dana UPTD SPF SD Negeri Mandumpang pada sub-rayon 1 dapat terlihat jumlah besaran dana dan alokasi pada 10 sekolah di sub-rayon 1 yang mendapatkan bantuan operasional sekolah dari pemerintah. Dalam alokasinya, pemerintah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menggunakan pembiayaan yang tersedia sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Komponen dasar yang menjadi arahan pemerintah dalam alokasi dana BOS tersebut diantaranya yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaan bos, pembelian perangkat computer, dan biaya lainnya jika seluruh komponen telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Berdasarkan hasil observasi pada sekolah UPTD Sekolah Dasar Negeri Mandumpang bahwa keadaan sekolah dari segi sarana prasana saja tidak memadai dimana memiliki 200 jumlah siswa laki-laki dan perempuan hanya memiliki satu kamar mandi serta daya tampung yang kecil. Lain dari itu pengadaan alat tulis kantor yang seharusnya disediakan oleh sekolah untuk guru, faktanya hal tersebut di sediakan oleh guru sendiri. Alokasi dana yang sudah direncanakan pada tahap awal ajaran baru sebaiknya di fungsikan untuk penambahan sarana prasana, kemajuan pendidikan seperti layanan perpustakaan untuk siswa dan guru, sarana prasarana, selain itu pengadaan kursi dan meja yang seyogyanya tidak ditemukan lagi kerusakan namun hal ini peneliti menemukannya.

Penggunaan dana BOS oleh UPTD Sekolah Dasar Negeri Mandumpang selama ini secara umum yaitu BOS dikelola oleh sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan ana BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Persoalan yang dihadapi sekolah UPTD Sekolah Dasar Negeri Mandumpang dalam pelaksanaan dana BOS antara lain yaitu adanya penyalahgunaan dalam penggunaan dana BOS. Dan sebaliknya persoalan yang dihadapi Dinas Pendidikan menuntaskan penyalahgunaan dan penyelewengan dana BOS di sekolah-sekolah masih banyak ditemukan. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS antara lain pengelola dana BOS tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah, dan banyaknya penyelewengan dalam pelaksanaan dana BOS.

Dan juga dana BOS berdampak positif dan berdampak negatif juga, dampak positif untuk sekolah pada umumnya apalagi yang ada di daerah-daerah “pinggiran” atau di pedesaan, dimana kemampuan ekonomi masyarakat/orang tua relatif terbatas, BOS jelas sangat membantu, bahwa banyak sekolah yang sebelumnya kesulitan membiayai kegiatan operasional (akibat minimnya kontribusi masyarakat) kemudian dapat membeli buku-buku teks, alat peraga, dan kebutuhan operasional lainnya dan juga membebaskan biaya bagi siswa yang kurang mampu. Dampak negatif dana BOS bagi sekolah yaitu bertambahnya beban dan tanggungjawab guru dengan rumitnya pembuatan laporan pertanggungjawaban BOS tak jarang mengakibatkan guru menjadi stres, terutama bagi guru yang memiliki tanggungjawab sebagai bendahara. Dan apabila sudah begitu berdampak juga kepada siswa akibatnya siswa juga terlantar karena tidak bisa mendapatkan materi pelajaran sebagaimana mestinya. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa sekolah-sekolah dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah, manajemen pembiayaan harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan guna mencapai visi misi sekolah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru. Sedangkan dalam objek penelitian adalah manajemen pembiayaan pendidikan di UPTD SPF Sekolah Negeri Mandumpang. Pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara dengan informan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagaimana Miles., et al (2018) yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*)..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan pendidikan tidak hanya perihal analisis sumber-sumber dana, melainkan penggunaan dana secara efisien. Dengan kata lain lebih banyak tujuan program yang dicapai dengan anggaran yang tersedia. Melihat bahwa pendidikan melibatkan banyak orang dan uang, baik dalam jumlah siswa maupun tenaga kerja yang terlibat, demikian juga dilihat dari jumlah anggarannya. Oleh karenanya perlu ada upaya untuk mengelola pembiayaan pendidikan yang baik secara efisien dan efektif demi memenuhi kebutuhan pendidikan yang berlangsung di sekolah sehingga tujuan dari sekolah tersebut dapat tercapai. Manajemen pembiayaan pendidikan di SD Negeri Mandumpang mengatur segala hal terkait dengan keuangan masuk dan keluar di sekolah. Di dalam manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah ini mencakup proses perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, dan pengendalian pembiayaan.

3.1 Perencanaan Pembiayaan Pendidikan Di UPDT Sekolah Dasar Negeri Mandumpang

Proses perencanaan anggaran sekolah diawali dari mengetahui darimana sumber dana diperoleh, sehingga dapat merencanakan pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber belajar dan alat pelajaran serta honorarium dan kesejahteraan.

Dana pendidikan Uptd Spf Sekolah Dasar Negeri Mandumpang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perencanaan dana pendidikan merupakan kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan guna tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Ada dua bagian dalam penganggaran yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan atau program-program sekolah dalam satu tahun. Untuk itu penganggaran harus berorientasi pada rencana dan sasaran program secara khusus dan umum. Berdasarkan dari hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap perhitungan alokasi pembiayaan pendidikan di UPTD SPF SDN Mandumpang menunjukkan bahwa perhitungan alokasi biaya pengembangan pendidik berawal dari adanya pendapatan dan belanja sekolah. Biaya pengembangan pendidik masuk ke dalam belanja sekolah yaitu sebagai biaya operasi atau biaya rutin. Penetapan alokasi biaya untuk pengembangan pendidik dilakukan di dalam RAPBS dengan mencantumkan nama ataupun uraian kegiatannya, satuannya, volume, biaya satuan, jumlah, sumber dana dan keterangan lainnya yang diperlukan untuk memberi penjelasan tentang alokasi alokasi biaya untuk pengembangan pendidik tersebut.

Perencanaan pembiayaan pendidikan di UPDT SPF Sekolah Dasar Negeri Mandumpang. Dalam rencana penganggaran memakai skala prioritas dengan mengacu pada delapan standar nasional pendidikan yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang telah disusun tidak menutup kemungkinan mengalami perubahan karena kebutuhan sekolah yang sebelumnya tidak dianggarkan.

3.2 Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Di UPDT SPF Sekolah Dasar Negeri Mandumpang.

Pelaksanaan dana pendidikan seyogyanya sesuai dengan perencanaan yang telah disusun tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) namun kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Sekolah menggunakan RKAS sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, namun sekolah masih bisa merubah RKAS itu jika dalam kondisi tertentu memang memerlukan perubahan. Dalam pelaksanaan pembiayaan di UPDT SPF Sekolah Dasar Negeri Mandumpang terdapat kegiatan yang juga amat penting yang dilakukan oleh bendahara sekolah yaitu (a) ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; (b) ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran; dan (c) ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

3.3 Evaluasi pembiayaan pendidikan di UPTD SPF Sekolah Dasar Negeri Mandumpang

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pendidikan, maka pelaksanaan evaluasi atau pengawasan pembiayaan di UPDT SPF Sekolah Dasar Negeri Mandumpang dilakukan pengawasan sebagai alat pengendali, sehingga dapat dipastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dengan demikian sekolah perlu memahami dan menyiapkan laporan serta pencatatan dan dokumentasi yang diperlukan terkait dengan pengawasan audit dan pengendalian oleh berbagai pihak.

Pengevaluasian pengembangan dana pendidikan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, komite dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Propinsi dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kegiatan. Kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan adil serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Salah satu komponen yang harus dipenuhi dari pembiayaan pendidikan di sekolah adalah untuk ketersediaan bahan habis pakai untuk operasional sekolah. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat.

3.4 Efektivitas manajemen pembiayaan pendidikan di UPTD SPF Sekolah Dasar Negeri Mandumpang

Sesungguhnya keberadaan pembiayaan pendidikan memberi dasar dan arah yang jelas bagaimana mengelola pembiayaan pendidikan di sekolah. Komponen pembiayaan sekolah perlu distandarkan serta perlu dimanajementi atau dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pengembangan mutu sekolah dan pencapaian tujuan sekolah. Hal ini penting, terutama dalam rangka menetapkan kriteria minimal tentang pembiayaan pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan sudahkah sekolah mengimplementasikan standar pembiayaan tersebut di sekolah.

Efektivitas pembiayaan pendidikan UPTD SPF Sekolah Negeri Mandumpang digunakan sesuai dengan rencana anggaran sekolah. Anggaran digunakan sesuai dengan rencana, pengalokasian dan penggunaannya. Pihak sekolah transparan dan akuntabilitas, serta mematuhi aturan dinas pendidikan terkait dengan penggunaan dan pelaporan dana. Belanja dana pendidikan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Amini., dkk (2023) menjelaskan bahwa penganggaran yang baik harus melalui perencanaan. Perencanaan harus memiliki tujuan untuk memahami; konsep, paradigma, strategi dan langkah-langkah perencanaan pendidikan Islam. Adapun hasil yang diharapkan dalam perencanaan ini adalah dapat merumuskan tujuan yang ingin dicapai dan terkendali dijalankan secara efektif dan efisien. Mesiono., dkk (2021) menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan harus dikelola secara efektif, efisien, produktif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur yang ada.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan hasil diantaranya (1) perencanaan anggaran pendidikan akan baik jika berdasarkan pada data yang valid, fakta, serta adanya keterlibatan unsur-unsur yang terkait yaitu pimpinan sekolah, guru, staf tata usaha, komite sekolah, satpam, penjaga malam dan siswa (OSIS). Perencanaan anggaran mengacu pada upaya tercapainya hasil (output) yang akan dicapai dengan skala prioritas yang mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP); (2) dalam pelaksanaan pembiayaan di UPDT SPF Sekolah Dasar Negeri Mandumpang terdapat kegiatan yang juga amat penting yang dilakukan oleh bendahara sekolah yaitu a) ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; b) ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran; dan c) ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran; (3) pengendalian dana pendidikan dilakukan

dengan memberikan laporan pendidikan dengan prinsip akuntabilitas public jika penggunaan dana pendidikan dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, Muhibbah A, & Syaiful, B. (2022). Analisis Manajemen Kepala Sekolah dalam Pembinaan Prestasi Siswa Masuk Perguruan Tinggi Favorit di SMA Negeri 1 TukkaTapanuli Tengah, *Jurnal Pendidikan Tambusai*
- Arikunto, S., Lia Y. (2008). *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta:AdityaMedia Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta : PT. Gramedia
- Depdiknas (2001). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Konsep dan Pelaksanaan*, Buku I, Jakarta : Tim Penulis
- Didin, K., Machali, I. (2015). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Fatah, Nanang, (2012). *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung:Remaja Rosdakarya
- George R. Terry, Leaslie W. Rue. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Indra, Prasetya. (2022). *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*. UMSU Press.
- Kartika, Prasetya, I., Sulasmi, E. (2023). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, UMSU Press.
- Rue, Leslie, W dan Terry, George, R. (2009). *Dasar-Dasar manajemen*, penerjemah:G.A.Ticoalu. Jakarta: PT. Bumi aksara.
- Sulasmi, E. (2020). *Manajemen dan kepemimpinan*. Cetakan ke-1. Depok : Rajagrafindo Persada
- Moleong L.J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakrya, 2000
- Mulyasa. E, (2003). *Menjadi Kepala Sekolah Professional, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Manajemen dan Kepemimpinan, Menjadi Kepala Sekolah* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyasana, Dedi. (2011). *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing.* Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nasution. S. (2004). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. IV ; Jakarta : Bumi Aksara.
- Paul V., & Bredeson (2013) *The school principal's role in teacher professional development*, *Journal of In Service Education, USA*, 2013
- Prasetya, I., Akrim., Pratiwi, S.N. (2020). *Lecturer Competency Development Model in Designing a Line Learning Resources in University of Muhammadiyah Sumatera Utara*. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 3, No 4, November 2020*

- Prasetia, I, Samosir, F. (2022). Manajemen Dana Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar Negeri 163088 Tebing Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi*, Vol 5 (3), 12-24.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Al-Fabeta.
- Wahyudi, Imam. (2012). *Pengembangan Pendidikan: Strategi Inovatif Dan Kreatif Dalam Mengelola Pendidikan Secara Komprehensif*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Werang, Basilius R. (2015). *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Yogyakarta: Media Akademi, 2015.
- Yahya, Murip. (2013). *Profesi Tenaga Kependidikan*. Bandung: CV. Pustaka Mulia.